

# Efektivitas Program Kampung KB dalam Peningkatan Kesejahteraan Kota Jayapura

Hendry Bakri<sup>1</sup>, Yakop Tasik<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email: bakrihendry@gmail.com<sup>1</sup>, [yakoptasik1983@gmail.com](mailto:yakoptasik1983@gmail.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPk serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.. Kamopung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPk yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Kata kunci : Efektivitas, Program Kampung KB, Kesejahteraan, Kota Jayapura

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah tahun 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), khususnya Agenda Prioritas ke-3 "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan", Agenda Prioritas ke-5 " Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia", serta Agenda Prioritas ke-8 "Revolusi Karakter Bangsa" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Amanat Presiden RI kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019,

kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.

Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). (BkkbN. Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB) Kampung KB merupakan satu diantara kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang

manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat. Untuk itu segera dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan di laksanakan di Kampung KB. Program KB tidak lagi hanya fokus pada upaya pengendalian jumlah penduduk, namun juga bagaimana melalui Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu, KB dipandang masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota. Kampung KB dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 , Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

### **Konsep Kampung KB**

Menurut BKKBN dalam buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Kaltim (2016), program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal

dengan program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.. Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

### **Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB**

Menurut BKKBN dalam Buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Kalimantan Timur (2016), dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

#### **Kriteria Utama**

- 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
- 2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

#### **b. Kriteria Khusus**

- 1) Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.
- 2) Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
- 3) Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

### **Teori Kesejahteraan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga

sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. .

Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga. d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi program Kampung KB

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk dalam Program Kampung KB yang ada di , berdasarkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara maka penetapan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada pendapat Notoatmodjo (2010) yang mengemukakan bahwa pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* adalah pengambilan sampel .

#### Hasil Pembahasan

Implementasi Program Kampung KB di (Kampung KB Yoka) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan baik Dinas terkait dalam pembentukkan Kampung KB maupun warga sendiri, bahwa informasi mengenai Program Kampung KB ini disampaikan dengan baik dan dapat diterima di masyarakat , bisa kita lihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama adanya Kampung KB dan warga pun mengetahui tujuan dari pembentukkan Kampung KB ini untuk peningkatan kualitas hidup mereka.

Menurut BKKBN dalam buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Kaltim (2016), program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pambangunan keluarga dan pambangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.. Kamopung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

#### **Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB**

Menurut BKKBN dalam Buku Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Kalimantan Timur (2016), dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:  
Kriteria Utama

- 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.
- 2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

#### Kriteria Khusus

- 1) Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.
- 2) Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
- 3) Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan.

#### Teori Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. .

Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs). b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga. c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) Yaitu keluarga

yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga. d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +) Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Dan informasi ini memiliki kejelasan dengan adanya amanat Presiden Jokowi, Agenda Nawacita serta perda-perda dalam pembentukan Kampung KB itu sendiri, serta informasi yang konsisten dalam penyampaiannya ini. Pihak instansi terkaitpun sudah melakukan fungsinya dengan baik serta berpartisipasi aktif dalam program Kampung KB di (Kampung KB Yoka), seperti halnya BKKBN Provinsi Papua yang menjadi pijakan pertama dalam pembentukan kampung baik dari anggaran maupun fasilitas lainnya. Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam hal ini tingkat Provinsi yang sudah melakukan sosialisasi-sosialisai ke tingkat Kabupaten serta melakukan monitoring dan selalu berkoordinasi dengan instansi-intansi lain yang terkait di seluh Provinsi sehingga terjalin komunikasi baik dalam proses atau berjalannya program kampung kb ini.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi baik itu dari BKKBN maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, antara lain mengenai anggaran, dalam persiapan terkhusus untuk Kampung KB sendiri, selain itu anggaran juga berasal dari dana APBN di mana anggaran itu sangat berbeda dari anggaran APBD yang harga-harganya jauh lebih murah dari dana APBN, lebih lanjut bahwa kendala-kendala lain berupa proses pembinaan di mana letak desa-desa yang memenuhi syarat dibentuknya kampung KB itu sangat jauh, jadi transportasi lebih mahal dan belum lagi jalan dan jembatan yang belum terbentuk sempurna sehingga menghambat proses pembinaan kampung kb itu sendiri. Untuk kendala di masyarakat sendiri belum bisa dirasakan karena kampung kb ini juga baru di desa mereka dan saat ini masyarakat masih mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kampung KB serta masih tahap pembenahan desa dengan adanya kampung KB ini.

Dengan adanya Kampung KB ini ada peningkatan- peningkatan yang sudah dirasakan terkhusus respon masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung KB seperti persiapan kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan kunjungan Kepala BKKBN RI, mengikuti program BKL, BKB, BKR serta UPPKS di mana semua kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera, dan untuk desanya sendiri agar menjadi Desa Ideal atau minimal Desa sejahtera yang mana masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan primer mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Anisa,

S.O. 2016. *Efektifitas Kebijakan Kampung KB Terhadap Penerimaan*

- Konsep Keluarga*. Cilacap BPS.2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan*.  
Kabupaten Bulungan
- BkkbN. 2016. *Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja*. Jakarta. Direktorat Bina Lini Lapangan
- BkkbN. 2016. *Pembentukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana*. Kalimantan Timur. BkkbN, 2016. *Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana*. Direktorat Bina Lini Lapangan
- BkkbN. 2017. *Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008
- Mardiyono. 2017. *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK*. Jawa Timur
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhafifah, Z. 2017. *Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Bandar Lampung.
- Nosa ,B.A & Sri,W.2017.*Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ambeng-ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.Jawa Timur.